

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENEGAH (UMKM) PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU

Nurhaeni Jaya, Cahyo Sasmito, Roro Merry C. Wulandari.

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tribhuwana Tungadewi.
Email : nurhainijaya02@gmail.com

Abstrak: Hambatan dalam pengembangan UMKM bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Salah satu permasalahan pelaku UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi, masih ada pelaku usaha yang tidak memiliki izin dari BPOM, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki mesin-mesin yang berteknologi tinggi salah satunya ialah mesin packing. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Keputusan (*Liberary Research*). Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Fokus dalam penelitian ini ialah “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kota Batu”. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah keputusan (*liberairy research*) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah informasi yang telah dikumpulkan kedalam unit-unit analisis. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam konteks komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan Struktur organisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah cukup Baik. Dalam hal sudah cukup baik. Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pengimplementasikan program tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan masyarakat, Program UMKM

Abstract: MSMEs in Batu is facing several problems such as product marketing, the lack of packing machines, and BPOM license. The purpose of this study was to determine the implementation of community empowerment programs through the UMKM and to identify the supporting and hindering factors for the implementation of the program.

This research is literature research. Data sources are in the form of secondary data. The research focus was the implementation of community empowerment through the UMKM Program at Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. The data collection methods were literature (library research) and documentation. While the data in the form of information that has been collected were analyzed into analysis units. The validity of the data was through external and internal critical analysis. The result showed that the implementation of this program is quite good from the aspect of communication, resource availability, disposition, and organizational structure. But, there are still some supporting and inhibiting factors that affect the program.

Keywords: Implementation, Community Empowerment, UMKM Program

PENDAHULUAN :

Meningkatnya angka kemiskinan menuntut semua pihak terutama pemerintah, hendak menurunkan nilai kemiskinan dengan beraneka macam program-program yang hendak terselenggarakan. Memanifestasikan berbagai program yang sudah direncanakan menjadi salah satu tahapan pemerintah untuk menurunkan nilai kemiskinan, meningkatkan pendapatan, kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan adalah usaha keras yang dilakukan agar mempersiapkan masyarakat sejalan dengan usaha memperkuat kelembagaan masyarakat supaya mampu mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian dalam tatanan keadilan sosial daerah yang berkelanjutan. Konsep pemberdayaan pada dasarnya yaitu usaha atau upaya untuk memandirikan dan mensejahterakan masyarakat (Rosidin, 2019:70-74).

Sama halnya yang dialami oleh Pemerintah Kota Batu sekarang ini, salah satu persoalan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi. Pelaku usaha pun wajib memiliki izin dari BPOM ataupun minimal produk industri rumah tangga (PRIT) agar dapat merambah ke pasar *online* (Malang Times, 2019). Faktor lain yang menjadi kendala perkembangan UMKM di Kota Batu ialah kemasan yang kurang maksimal karena pelaku UMKM tidak mempunyai mesin kemasan atau mesin *packing* (Malang Times, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer beserta data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Peneliti, pedoman wawancara dan catatan lapangan menjadi instrumen di dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini ialah di Kota Batu. Dan penelitian ini menggunakan metode analisis dari Model Interaktid Miles dan Huberman, yang di dalamnya yakni pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Komunikasi**

Salah satu faktor yang bisa mendorong pelaksanaan implementasi program pemberdayaan UMKM, yaitu komunikasi. Kesesuaian implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dan koordinasi dari berbagai organisasi pada tingkatan yang berbeda. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM dalam kontes komunikasinya, sudah mengupayakan yang terbaik dalam pengembangan UMKM Kota Batu, hal tersebut dilihat dengan bagaimana Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu melakukan kerja sama internasional dengan Negara lain, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan masyarakat dalam pengembangan produk usaha mikro kecil Kota Batu, hingga kini produk UMKM Kota Batu sudah mulai merambah hingga ke pasar export. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota batu juga melakukan komunikasi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu serta Kelompok Penguyuban Usaha Kota Batu". Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar aktor kebijakan pemberdayaan masyarakat

melalui program UMKM di Kota Batu sudah sangat baik. Adanya koordinasi komunikasi dalam bentuk kerjasama antar Implementor dengan negara lain, perusahaan-perusahaan dan masyarakat serta pelaku UMKM Kota Batu menentukan keberhasilan komunikasi.

Ketersediaan Sumber Daya

Dapat dikatakan bahwa terkait ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya peralatan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM di Kota Batu sudah sangat baik. Sebagaimana disampaikan bahwa pelaku yang terlibat dalam program UMKM akan dilatih dalam berbagai program dengan kemampuan yang mereka miliki. Disisi lain, pemerintah sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pembiayaan setiap kebutuhan pelaku UMKM dengan fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Rosidin (2017:73-74) upaya pokok yang dapat dilakukan dalam setiap pemberdayaan masyarakat (pelaku UMKM) adalah melalui bina manusia dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas; bina usaha yang memegang peran penting karena memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan; bina lingkungan sebagai persyaratan investasi dan operasi yang berkaitan dengan perlindungan, pelestarian serta pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan bina kelembagaan. Dengan adanya Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Aurindo) maka Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM Kota Batu dapat terlaksana dengan baik.

Disposisi

Dalam hal pembuatan kebijakan kegiatan atau program pemberdayaan pelaku UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Batu sudah cukup baik dan sejauh ini para pelaku UMKM menerima dan mendukung program-program yang telah dibuat dalam hal pemberdayaan UMKM ini. Pengimplementasian program tersebut sangat mendukung perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Peningkatan pelaku UMKM menunjukan bahwa program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu diterima baik oleh pelaku UMKM. Disampaikan oleh Edward III (1980) dalam Mukarom dan Laksana (2018:207-209) bahwa sikap dan komitmen ini berhubungan dengan kesediaan para implementor untuk menyelesaikan suatu kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap pemerintah dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Struktur Birokrasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin. Pentingnya kinerja implementasi kebijakan akan banyak dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Kesesuaian dalam penempatan posisi pada struktur yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menempatkan orang-orang yang tepat serta dinilai ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat dilihat pada tugas pokok serta fungsi dalam implementasi kebijakan (program) pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM sudah sangat baik.

Berdasarkan hasil kajian teori sampai pada penelitian, dari hasil yang sudah disajikan peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu, adapun di Kota Batu jika dilihat dari implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat (pelaku) Usaha Mikro Kecil Menengah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Dinas terkait, dan sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari segi komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, hingga struktur organisasinya sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh dinas terkait.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah

Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa instrumen yang mendukungnya. Salah satu faktor yang dapat mendorong pelaksanaan implementasi program pemberdayaan UMKM, yaitu komunikasi. Tersedianya konsultan pemberdayaan UMKM, Pendanaan, dan Kelompok asosiasi pengusaha Kota Batu adapun diantaranya yaitu: Komunikasi seperti brosur, iklan, press release, pertemuan-pertemuan publik, pelatihan pelaku usaha, dan intruksi tertulis merupakan alat-alat yang dapat mengkomunikasikan kebijakan kepada individu-individu atau lembaga-lembaga yang terkena kebijakan, serta mampu menjalin kerja sama dengan negara lain, perusahaan dan juga masyarakat. Bentuk komunikasi seperti ini memberi dampak positif bagi kalangan pelaku usaha atau pemerintah selaku implementor dan pengawasan dan mempermudah jangkauan konsultan untuk mengakses kelompok pelaku usaha, karena media massa sangat berguna dalam pesebaran informasi juga jauh lebih efisien dan menghemat biaya transportasi (Eka & Merry). Sebagaimana dijelaskan Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92) bahwa komunikasi dalam suatu implementasi sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi saat pelaksanaan kegiatan program. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dalam pemberdayaan masyarakat (para pelaku UMKM) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu melakukan pembinaan, pelatihan yang ditangani langsung oleh konsultan yang keberadaannya di Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu. Dalam melancarkan aktivitas pemberdayaan maka diperlukan pendanaan yang sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi lokal, sebagai perwujudan dari visi ke tiga Kota Batu terkait UMKM melalui visi itu ditahun 2018 mendapatkan penambahan anggaran sebesar 14 milyar namun anggaran yang diperuntukan untuk UMKM sebesar (Rp. 1.881.038.337), penggunaan anggaran tersebut untuk merealisasikan program prioritas Kota Batu salah satunya UMKM. Selain melakukan pembinaan dan pelatihan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga menyiapkan rumah kemasan (*packing*) gratis yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya agar mereka mampu berdaya saing melalui desain yang keren. Desain yang dibuat pun tidak sekedar membuat desain tetapi dipertimbangkan banyak faktor, diantaranya ada segmen pasar yang tepat, brand image, serta elemen-elemen yang akan di cantumkan kemasan. Sebagaimana disampaikan oleh Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92) bahwa meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber

daya finansial.

Dengan adanya kejelasan di dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Batu. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Tambunan (2002) dalam Wardani, ddk (2013) yang menyatakan peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik salah satunya adalah implementasi, kolaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM pemerintah pusat. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan perdagangan menempatkan orang-orang yang tepat serta dinilai ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat dilihat pada tugas pokok serta fungsi dalam implementasi kebijakan (program) pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM. Sebagaimana dijelaskan Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92) bahwa Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisais adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Batu adalah keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UKM, diantaranya adalah konsultan dan tenaga penyuluh. Pelaku usaha yang takut bersaing secara sehat, dimana pelaku usha yang sudah lebih dulu masuk dalam dunia usaha tidak membagikan pengetahuan yng merek dapat dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti terdahulu. Hal ini tentunya didasarai ras takut disaingi oleh pengusaha-pengusaha yang akan datang. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaku usaha itu sendiri seperti tidak dapat memasarkan produk dipasar modern, tidak ada kepercayaan pemerintah terhadap produk, dan sulit untuk dikembangkan, Alasan para pelaku usaha tidak mengurus izin usahanya disebabkan oleh prosedur administrasi dan birokrasi yang agak rumit serta lamanya proses administrasi akibat peraturan-peraturn dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau menentu arahnya. Sebagaimana dijelaskan Edward III dalam Subarsono (2011:90-92) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisais adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota batu sudah berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perannya masing-masing.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Implementasi program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Batu dilihat dari segi komunikasi sudah sangat baik, diaman dapat dilihat dari adanya kerjasama internasional salah satunya adalah negara Dubai. Dilihat dari Ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu cukup baik, dimana dalam merelisasikan program UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu menyiapkan anggaran khusus. Dalam

pengimplementasian program tersebut, didukung oleh sikap dan komitmen dari pelaksana program. Disposisi atau sikap Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yang cakap terhadap setiap program yang dilaksanakan, serta sikap pelaku UMKM yang menerima dan mendukung setiap progra yang tetapkan menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana program kota batu sudah cukup baik. Serta para pemangku kebijakan yang berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perannya masing-masing yang sudah terorganisir sudah baik, Dengan dibantu oleh Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Akurindo) yang akan terjun langsung ke masyarakat membantu manajemen perijinan, akses permodalan sehingga pemasaran tak putus di tangan jalan.

Dalam pengimplementasiannya tentu tidak terlepas dari dua faktor yang dapat mempengaruhinya, diantaranya ialah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil menengah adalah komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur organisasi yang baik. Terdapat beberapa sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial serta sumber daya pendukung lainnya. Sedangkan untuk faktor penghambat itu sendiri adalah masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha, pelaporan usaha yang tidak stabil dijalankan, kebiasaan pelaku UMKM yang takut bersaing secara adil, masih terdapat kendala dalam fasilitas pendukung dalam pengimplementasian terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mukarom, Zaenal. & Muhamad Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*: Edisi 6. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Statistik, Badan Pusat. 2019. *Analisis Hasil SE2006 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Analisis, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tambunan, Tulus T. H. 2017. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Daerah (PERDA) Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Jurnal dan Skripsi

- Eka & Merry. 2109. *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)*. JISIP: Universitas Tribhuwana Tungadewi (JISIP, Volume 8, No. 2 Tahun 2019).
- Herlyansah, Pradytia. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang*. Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Raja, Imelda Napa. 2018. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Membatik*. Skripsi: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Sucipto & Sutarto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup melalui Kursus Menjahit di LKP Elisa Tegal*. *Journal Of Nonformal Education and Community Empowerment*. Universitas Negeri Semarang (volume 4, nomor 2, tahun 2015)

Internet

- Batu. Shining. 2020. *Pemerintah Kota Katu* (<https://batukota.go.id/Portal/profil#1> (Online)).
- Kompas.com. 2019. *Anggota Komisi IV: Garis Kemiskinan Indonesia Di bawah Standar Dunia*. (<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16553951/anggota-komisi-iv-garis-kemiskinan-indonesia-di-bawah-standar-dunia> diakses pada tanggal 11 November 2019 (Online)).
- Statistik, Badan Pusat. 2017. *Sandingan Data UMKM 2012-2017*. (https://www.coursehero.com/file/36038489/SANDINGAN-DATA_UMKM_-2017.pdf/ diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 (Online)).
- Statistik, Badan Pusat. 2020. *Statistik Daerah Kota Batu 2020* (<https://batukota.bps.go.id/publication/2020/08/06/ee333686b6c67d4e11a072c2/statistik-daerah-kota-batu-2020.html> diakses pada tanggal 6 Agustus 2020 (Online)).
- Times.com, Malang. 2019. *Pemkot Siapkan Website Khusus untuk Pasar Online Seluruh Produk UMKM Kota Batu* (<https://www.malangtimes.com/baca/37121/20190317/185200/pemkot-siapkan-website-khusus-untuk-pasar-online-seluruh-produk-umkm-kota-batu> diakses pada tanggal 17 Maret 2019 (Online)).
- Times.com, Malang. 2018. *Pemkot Batu Bangun Kompleks UMKM Terintegrasi, Dilengkapi Mesin Modern Canggih* (<https://www.malangtimes.com/baca/27697/20180518/103219/pemkot-batu-bangun-kompleks-umkm-terintegrasi-dilengkapi-mesin-modern-canggih> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 (Online)).